

LAPORAN PENELITIAN

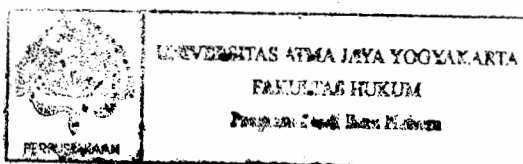
**ANALISIS PERLINDUNGAN ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL TRADISIONAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



C.Kastowo,SH.MH.

Th. Anita Christiani, SH., M.Hum

Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2006



LEMBAR PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : ANALISIS PERLINDUNGAN ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
- b. Macam Penelitian : Lapangan
- Personalia Ketua Penelitian
- a. Nama : C. Kastowo, SH.MH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Usia : 45 tahun 4 bulan
- d. Jabatan Akademik/Golongan : Lektor Kepala /IIId
- e. Fakultas : Hukum
- Personalia Anggota Peneliti
- Nama Anggota I : Th. Anita Christiani, SH.M.Hum
- Lokasi penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
- Biaya yang diperlukan : Rp. 3.740.000

Yogyakarta, Januari 2006

Anggota I

(Th. Anita Ch)

Ketua Peneliti

(C. Kastowo)

Kepala Bagian

(Th. Anita CH, SH, M. Hum)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
Dekan

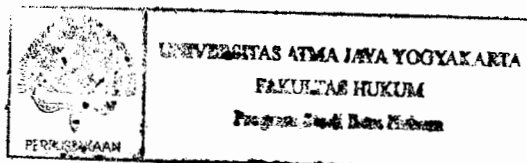
FAKULTAS
HUKUM

(B) Hestu Cipto Handoyo, SH., M. Hum)

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Ketua LPPM

LEMBAR
PENGESAHAN

(Ir. B. Kristyanto, M. Eng., Ph.D)



KATA PENGANTAR

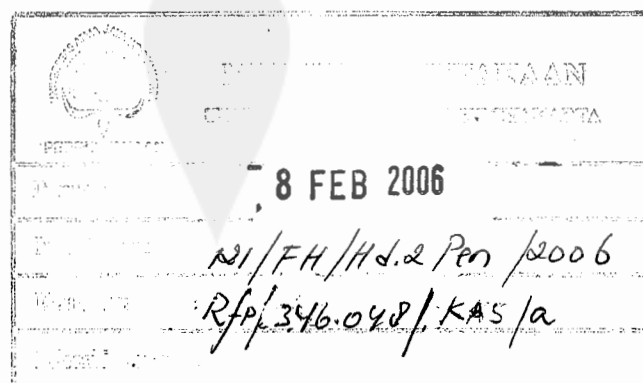
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih atas pekenannya sehingga penelitian dengan judul Analisis Perlindungan Atas Kekayaan Intelektual Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terselesaikan.

Penelitian ini adalah merupakan salah satu langkah awal dalam memikirkan berbagai persoalan hukum hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat kebanyakan. Harapan yang akan dicapai adalah dengan kejelasan tentang subyek pemegang kekayaan intelektual tradisional maka upaya mempertahankan hak dapat menjadi efektif. Harapan lain adalah agar pemerintah daerah atau siapapun juga yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat tradisional untuk mengambil langkah konkret guna memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual kelompok masyarakat yang secara ekonomis lemah tetapi kuat dalam kreasi dan inovasi.

Terima kasih kepada semua pihak, kepada nara sumber yang telah banyak memberikan waktu untuk berdialog dengan peneliti.

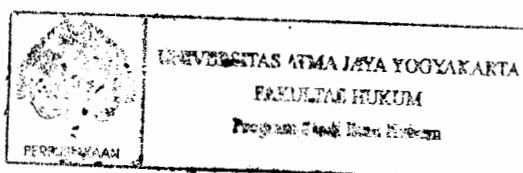
Yogyakarta, Januari 2006

Peneliti.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	li
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak	Vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III PERUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	19
A. Perumusan Masalah	19
B. Tujuan Penelitian	19
C. Manfaat Hasil Penelitian	19
BAB IV METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Sumber Data	20
C. Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data	21
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
BAB VI PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran-Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	46



ABSTRAK

Kekayaan intelektual tradisional merupakan asset daerah yang sekaligus sebagai asset bangsa yang perlu dijaga dipelihara dilestarikan serta dilindungi. Perlindungan memiliki makna yaitu merupakan langkah yang bersifat preventif dan represif. Karakter kekayaan intelektual tradisional merupakan kekayaan komunitas masyarakat tidak dapat dengan begitu saja dilindungi dengan peraturan kekayaan intelektual yang ada. Penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai siapakah subyek yang berhak atas kekayaan intelektual tradisional, upaya dalam rangka melindungi kekayaan intelektual tradisional serta kendala yang muncul. Dalam penelitian ditemukan hal hal sebagai berikut bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang dapat menjadi representasi dari pemilik kekayaan intelektual tradisional meskipun terdapat keterbatasan dalam hal berhadapan dengan negara lain. Pendaftaran sebagai upaya memberikan perlindungan hanyalah memiliki posisi hukum yang sama dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas kekayaan intelektual tradisional, yaitu sebagai dasar untuk melakukan oposisi jika terjadi pengambilan kekayaan intelektual tradisional oleh bangsa lain.

Kata kunci: kekayaan intelektual tradisional, Pemerintah daerah, Inventarisasi dan Dokumentasi.

BAB I

PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Undang-undang Hak Cipta No. 12 tahun 2002 secara tegas dinyatakan bahwa: Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para Penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Suku-suku dalam masyarakat Indonesia baik yang besar maupun yang kecil memiliki budaya dan tradisi yang unik dan khas yang masih dipelihara sejak para pendahulu mereka sampai dengan saat sekarang. Budaya kelompok masyarakat tersebut secara mudah dapat diamati melalui berbagai karya seni yang ada. Tradisi kelompok masyarakat dapat dilihat dari berbagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya dan tradisi dalam satu kelompok masyarakat memiliki muatan nilai yang hidup dan dianut serta diyakini oleh masyarakatnya dengan didukung oleh kemampuan yang secara turun temurun diwariskan oleh para

leluhur mereka. Dengan demikian kelompok masyarakat memiliki kekhasan dan keunikan jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain.

Begitu banyaknya kelompok masyarakat yang ada dengan banyaknya tradisi yang ada pada mereka, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bangsa Indonesia memiliki kemampuan dan pengetahuan tradisional yang sangat banyak. Teknologi tradisional tersebut secara keseluruhan merupakan kekayaan dan potensi yang jika diolah dan dikembangkan tentu asset yang riil dan mampu menempatkan bangsa Indonesia sebagai subyek yang akan dipertimbangkan oleh bangsa lain dalam perdagangan internasional.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap karya kreatif manusia. Namun demikian kekayaan intelektual tradisional dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak seluruhnya dapat diberikan perlindungan melalui hukum kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh Indonesia.

Persoalan pengetahuan dan kekayaan intelektual tradisional meliputi nilai kebaruan atas kekayaan pengetahuan tradisional dari aspek hukum paten dan subyek pemilik hak kekayaan intelektual tradisional yang ada.

Peraturan bidang hak kekayaan intelektual tidak mengatur secara rinci mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual tradisional. Peraturan perundang-undangan bidang kekayaan intelektual hanya menyinggung secara sekilas tentang kekayaan intelektual tradisional. Peraturan hak kekayaan intelektual yang menyinggung kekayaan intelektual tradisional hanyalah pada Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang mengatur tentang folklor dan negara sebagai pemegang hak kekayaan intelektual atas karya prasejarah dan karya seni tradisional.

Kekayaan intelektual tradisional sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa negara sebagai pemegang Hak dalam upaya melindungi dan menghindari kepunahan dan dalam rangka mempertahankan hak terhadap pengambilan yang dilakukan oleh pihak asing. Negara dalam hal ini adalah memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk dapat tetap mempergunakan dan mengambil keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual tradisional tersebut.

Realita menunjukkan bahwa kekayaan intelektual tradisional sangat erat hubungannya dengan suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu daerah tertentu. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata yang mengandalkan kekayaan intelektual tradisional tentu saja memiliki kepentingan untuk melestarikan dan mempertahankan kekayaan intelektual tradisionalnya.

Berbagai upaya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat dalam upaya melestarikan dan melindungi kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh Yogyakarta. Dalam upaya perlindungan itulah maka terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapatkan analisis dan jawaban sehingga upaya pelestarian dan perlindungan yang dilakukan dan akan dilakukan dapat memberikan hasil yang memadai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pembentukan hukum positif yang memberikan perlindungan kepada subyek pencipta untuk mengambil keuntungan ekonomis dan hak moral disandarkan pada ketentuan artikel 27 (2) *Declaration of Human Right* yang menyatakan “*every ones has a right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific , literary or artistic production of which he is the author.*” Artikel 27 (2) ini kemudian dikembangkan oleh negara-negara maju sebagai dasar dan landasan dalam membuat perjanjian-perjanjian dalam hubungan antar negara terkhusus dalam perdagangan internasional.

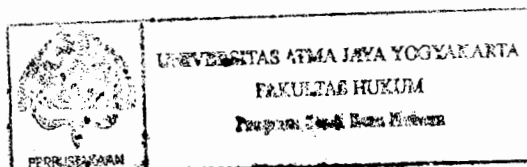
Setiap manusia mempunyai hak untuk menikmati dan juga termasuk untuk mengeksploitasi hasil karyanya berupa karya fisik maupun non-fisik seperti hasil pemikiran, ide, kreativitas dan hasil-hasil intelektual lainnya yang terkait. Jika seseorang menghasilkan suatu karya, maka karya tersebut merupakan miliknya dan tidak dapat dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pihak yang berhak. Oleh karena itu setiap orang mempunyai dan bisa menikmati hak-hak alamiahnya, tanpa memerlukan izin dari pemerintah. Kesimpulannya adalah bahwa HKI merupakan salah satu hak alamiah/dasar yang dimiliki setiap manusia yang berkarya dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari hak alamiah yang diberikan sang pencipta kepada setiap manusia yang mampu.

Sebagai konsekwensi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota organisasi perdagangan Dunia (WTO) dan sebagai salah satu negara penandatangan perjanjian yang tertuang dalam GATT maka Indonesia harus menyesuaikan peraturan

perundangan khususnya di bidang HAKI . Pembentukan Undang-Undang di bidang HaKI tersebut dan peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya untuk membangun satu sistem hukum HAKI Indonesia yang sejalan dengan tuntutan perkembangan sistem perdagangan global yang berlandaskan pada prinsip perdagangan bebas.

Pembentukan peraturan perundangan di bidang HAKI tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap produk karya-karya intelektual yang diciptakan bangsa kita sendiri .

Saat ini Indonesia sudah mempunyai peraturan perundangan di bidang Haki yang cukup lengkap antara lain Undang-undang Hak Cipta yaitu UU No 19 tahun 2002, Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1982 yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 dan UU Nomor 12 tahun 1997, Undang-undang Merek yang sekarang ada adalah UU NO 15 Tahun 2001 tentang Merek , Undang-undang ini menggantikan Nomor 19 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997,. Kemudian UU Paten yang sekarang berlaku mulai 1 Agustus 2001 yaitu UU nomor 14 Tahun 2001 Tentang paten, undang-undang ini menggantikan UU Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten. Pada tahun 2000 juga sudah diundangkan UU tentang Rahasia Dagang yaitu UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang , kemudian UU nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak sirkuit Terpadu. Ketiga undang-Undang ini disahkan secara bersama-sama pada tanggal 22 Desember Tahun 2000.



Pokok pengaturan HKI

Selanjutnya akan diuraikan secara detail mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut sebagai berikut:

A. Hak Cipta

Sejak tanggal 29 Juli 2002 Indonesia memiliki peraturan perundangan di bidang hak cipta yang baru yaitu Undang-Undang No 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1997. Munculnya peraturan perundangan di bidang hak cipta ini juga sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia atau WTO.

Obyek hak cipta menurut pasal 1 Undang-undang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dari bunyi pasal 1 tersebut dapat dikaji bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif atau hak istimewa yang berarti bahwa hanya pencipta saja yang mempunyai hak untuk mempergunakan sendiri hak ciptanya orang lain atau pihak lain dilarang mempergunakan hak cipta

tersebut tanpa izin dari pencipta. Obyek pengaturan hak cipta atau bidang yang dapat dilindungi oleh hak cipta yaitu hasil setiap karya cipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan yang dilindungi mencakup :

1. buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain,
2. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi
11. Sinematografi

12. Terjemahaan, tafsir ,saduran, bunga rampai , database, dan karya lain dalam bentuk pengalihwujudan.

Berkaitan dengan pengetahuan tradisional maka dapat dilihat dalam ketentuan pasal 10 ayat 2 UU hak Cipta yang menyatakan :

Negara memegang Hak cipta atas forklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita,hikayat, dongeng, legenda,babad, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk berkedudukan sebagai pemegang atas karya-karya tradisional tersebut ,sehingga warga negara boleh memanfaatkan penggunaan karya-karya tradisional terebut tanpa ijin dari instansi yang berwenag. Ketentuan pasal 10 ayat 2 ini menang berlaku tanpa batas dimana hal ini mirip dengan ketentuan didalam indikasi geografis dalam undang-undang merek yang juga berlaku tanpa batas kecuali ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar dan atau kulaitas diberikannya indikasi tersebut sudah hilang.

B. Paten

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini yang mengatur tentang paten adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Obyek pengaturan paten adalah invensi dibidang teknologi. Invensi dalam hal ini adalah ide yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi baik berupa produk ataupun proses atau penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses .

Invensi dapat dipatenkan harus mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. New/Novel (pasal 3 ayat 1)

New atau novel ini berarti bahwa invensi tersebut belum pernah diumumkan dan didemonstrasikan di Indonesia atau diluar Indonesia. Bila invensi tersebut sudah pernah didemonstrasikan maka tidak dianggap memenuhi syarat kebaruan ini.

2. Inventive step (pasal 2 ayat 2)

Ukuran dari inventive step ini yaitu bahwa penemuan ini dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya .

3. Industrial applicable (pasal 5)

Hal ini berarti bahwa penemuan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam industri.

Tidak semua invensi dapat dipatenkan, ada beberapa hal yang bukan dianggap sebagai invensi antara lain:

1. Telah dikenal atau digunakan

2. Telah digambarkan dalam paten, publikasi cetak

3. Telah digunakan secara umum dijual lebih dari satu tahun sebelum diajukan paten

4. Telah digambarkan dalam paten/publikasi cetak lebih dari satu tahun sebelum diajukan paten.

Tidak semua invensi dapat diberikan paten. Pasal 7 Undang-Undang paten menyebutkan bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku , moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan
- b. Metode pemeriksaan, perawatan , pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika atau
- d.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
 - ii. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis

Didalam paten dikenal dengan nama paaten sederhana yaitu invensi yang berupa produk atau alat baru dan mempunyai nilai guna praktis yang disebabkan oleh bentuk konfigurasi dan komponennya .

Jangka waktu perlindungan paten adalah untuk paten sepanjang 20 tahun dan untuk paaten sederhana sepanjang 10 tahun.

Kedudukan penemu terdahulu ini tetap diakui meskipun kemudian ada paten untuk hal yang sama

Dasar pengakuan permohonan ke dirjen Haki . Hal ini berarti bahwa hak pemegang paten akan diakui jika penemu paten tersebut mendaftarkan haknya kepada Dirjen Haki . hal ini berarti bahwa tanpa permohonan paten

tersebut maka penemu tidak akan memperoleh hak atas penggunaan paten , dalam praktek bila ada seorang penemu yang menemukan sesuatu lebih dulu tetapi tidak mendaftarkan maka bagi negara yang akan dilindungi adalah penemu yang mendaftarkan penemuannya walaupun si penemu tadi menemukan sesudah penemu yang pertama.

Isi hak dari pemegang paten adalah :

1. paten produk membuat , menggunakan, menjual, mengimpor , menyewakan, menyerahkan /menyerahkan untuk dijual / diserahkan produk yang diberi paten
2. Paten proses menggunakan dan tindakan lain seperti telah diuraikan diatas

Adapun kewajiban dari pemegang paten yaitu :

1. Memproduksi atau menggunakan proses di Indonesia
2. Membayar biaya tahunan

Di dalam paten dikenal adanya lisensi yaitu :

1. Lisensi eksklusif

Lisensi ini mengandung arti bahwa tidak orang selain penerima lisensi, si pemilik paten juga tidak berhak lagi..

2. Lisensi tunggal

Lisensi diberikan kepada satu orang, sedangkan si pemilik paten tetap mempunyai hak untuk menggunakannya.

3. Lisensi non eksklusif.

Lisensi ini berarti bahwa pemilik paten tetap mempunyai hak dan dapat beroperasi bebas, serta bebas untuk membuat lisensi kepada pihak lain juga secara bebas.

Bentuk pelanggaran dalam paten yaitu memproduksi, mengimpor, menjual tanpa hak, sedangkan sanksi yang diberikan bagi pihak yang melakukan bentuk pelanggaran tersebut yaitu denda 100 juta dan pidana 7 tahun dan ancaman pidana denda 500.000 dan pidana 4 tahun. Bila dikaji dari peraturan tersebut maka dapat dilihat bahwa ancaman pidana yang diberikan terlalu ringan bila dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh si pelanggar.

C. Rahasia Dagang

Pengertian dari rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna bagi kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Pengaturan mengenai rahasia dagang terdapat dalam UU No 30 Tahun 2000. Unsur-unsur rahasia dagang yaitu :

1. Informasi rahasia di bidang teknologi
2. mempunyai nilai ekonomi
3. dijaga kerahasiaannya

Ruang lingkup rahsssaia dagang adalah metode produksi , pengolahan, penjualan atau informasi, lain di bidang teknologi dan atau bisnis.

Perolehan hak tidak memerlukan formalitas pendaftaran karena munculnya hak hak karena Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa pemegang rahasia dagang tidak diharuskan mendaftarkan, selama dia masih dapat menjaga kerahasiaannya maka dia diberikan hak oleh undang-undang untuk memegang hak rahasia dagangnya.

Jangka waktu perlindungan selama masih dijaga kerahasiaannya, selama dia masih dapat menjaga kerahasiaannya maka si pegang masih mendapat haknya sehingga jangka waktunya tidak ditentukan,

Kriteria perlindungan raahasia dagang yaitu dijaga akerahasiannya dibuat perjanjian tertulis tentang kewajiban merahasiakan .

Bentuk pelanggaran rahasia daagang yaitu sengaja mengungkap kerahasiaan , mengingkari kesepakatan merahasiakan. Dalam prakteknya memang antara si penemu dengan pihak yaang terkait akan mengadakan suatu perjanjian supaya pihak pihak yang terkait tidak maembocorkan rahasia tersebut dengan ancaman sanksi yang ditentukan. Adapun sanksi yang di berikan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran adalah dua tahun dan denda 300 juta rupiah. Pelanggaran atas rahasia dagang merupakan delik aduan yang berarti bahwa pelanggaran atas rahasia dagang untuk ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum baru ada setelah adanya pengaduan dari pemilik rahasia dagang tersebut.

D. Disain Industri

Pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Unsur-unsur dari disain industri :

1. Suatu kreasi tentang bentuk , konfigurasi atau komposisi
2. Tiga dimensi
3. Mengandung nilai estetika
4. Dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi
5. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk , barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan .

Cara memperoleh hak adalah dengan cara pendaftaran. Jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan

Bagi pemegang hak diberikan hak untuk melaksanakan dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor, menjual dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain.

D. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-undang yang berlaku berkaitan dengan desain tata letak sirkuit terpadu yaitu UU Nomor 32 tahun 2000

Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik tertentu.

Didalam desain industri hal yang dilindungi adalah elemen-elemen yang ada pada sebuah semikonduktor dan menghasilkan fungsi elektronik

Syarat suatu elemen tersebut dapat diberi perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu yaitu harus orisinal dan tidak merupakan hal yang bersifat umum yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pencipta mempunyai hak untuk memakai, membuat, menjual, mengimport dan mengedarkan, orang lain dilarang mempergunakan penemuan tersebut tanpa izin dari pencipta kecuali untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan dan non komersial dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi designer.

Yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dalam desain tata letak sirkuit terpadu yaitu membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang didalamnya telah diberi hak disain secara tanpa hak. Hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 3 tahun dan denda 300 juta rupiah.

E. Merek

Merek adalah suatu tanda yang berupa susunan huruf, angka, kata, gambar atau warna atau kombinasi dari itu semua yang digunakan sebagai tanda pembeda produk satu dengan produk yang lain. Perolehan hak pada merek dengan melakukan pendaftaran pada kantor Merek Dit Jen HKI Departemen Hukum dan HAM. Hak merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya.

Untuk mendapatkan haknya maka pemilik merek harus mendaftarkan mereknya. Tanpa pendaftaran maka si pemilik merek tidak akan dapat mendapatkan perlindungan hukum. Merek dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pengetahuan tradisional apabila pengetahuan tradisional tersebut mempunyai merek terdaftar. Apabila merek dari pengetahuan tradisional itu ditiru oleh seseorang, maka pemiliknya mempunyai hak untuk menuntutnya (M. Hawin, 2005, 8) Tetapi dalam prakteknya tidak semua merek atau jarang sekali ditemukan bahwa pengetahuan tradisional tersebut didaftarkan. Oleh karena itu supaya pengetahuan tradisional tersebut dapat dilindungi maka harus

ada upaya yang dilakukan supaya pengetahuan tradisional tersebut didaftarkan.

Undang-undang merek Tahun 2001 berisi ketentuan tentang indikasi geografis dan indikasi asal . Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 56 (1) UU merek yang memberikan pengertian tentang indikasi geografis yaitu :

Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang , yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam , faktor manusia , atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan .

Perlindungan diberikan apabila indikasi geografis yang bersangkutan terdaftar atas dasar permintaan lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan . Lembaga yang dimaksud adalah terdiri dari pihak yang mengusahakan barang-barang yang dimaksud hasil alam atau kekayaan alam, atau produsen barang hasil pertanian atau pembuat barang-barang kerajinan atau hasil industri atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut. Selain itu dapat pula lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk itu atau bahkan kelompok konsumen barang-barang tersebut . Dari beberapa alternatif siapa yang paling relevan sebagai pemegang hak pada pengetahuan tradisional bila pengetahuan tradisional akan diberikan yang namanya perlindungan akan indikasi geografis adalah masyarakat pembuat barang-barang kerajinan tangan di daerah itu yang lazim

disebut perajin. Mereka ini merupakan subyek pengaturan yang relevan untuk dipermasalahkan hak-hak perlindungannya . (Henry S,2005,5)

Selanjutnya pasal 59 UU merek mengatakan bahwa apabila suatu tanda untuk suatu pengetahuan tradisional memenuhi syarat-syarat tersebut tetapi tidak didaftarkan atau tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dan semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa menurut undang-undang merek tetap mendapatkan perlindungan sebagai suatu indikasi asal.

Dalam pengaturan Hak di Indonesia konsepsi indikasi geografis dengan UU No 14 tahun 2001 tentang merek telah diakomodasi. Pengaturannya dijadikan satu dengan indikasi asal. Pengaturan ini memberikan ruang bagi kekayaan intelektual tradisional yang terkait dengan kekhasan atas suatu produk.

BAB III

PERUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam penelitian ini akan diangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan guna melindungi kekayaan dan pengetahuan tradisional ?
2. Siapakah yang dapat menjadi subyek hak atas kekayaan dan pengetahuan tradisional kelompok masyarakat tertentu ?
3. Kendala-kendala apakah yang mungkin muncul dalam upaya pemberian perlindungan kekayaan tradisional ?

B. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan guna melindungi kekayaan dan pengetahuan tradisional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis siapakah yang dapat menjadi subyek hak atas kekayaan dan pengetahuan tradisional kelompok masyarakat tertentu
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang mungkin muncul dalam upaya pemberian perlindungan kekayaan tradisional

C. Manfaat Hasil Penelitian:

Untuk dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan berkaitan dengan hak-hak mereka dalam hak atas kekayaan intelektual.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke masyarakat pengrajin untuk memperoleh data primer yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah serta bahan-bahan tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah :

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu para pejabat di tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait dengan teknologi dan kesenian tradisional.

Antara lain:

- a. Pejabat Kantor Wilayah Pendidikan Nasional DIY
- b. Pejabat Kantor Wilayah Kebudayaan dan Pariwisata DIY.
- c. Pejabat Kantor Hukum dan HAM DIY
- d. Pengurus Sentra Kesenian dan Kerajinan di 4 Kabupaten dan Kota di DIY.

1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung yang berupa bahan pustaka baik berupa:

Bahan Hukum Primer yaitu berupa produk hukum yang memiliki daya mengikat.

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan pustaka lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

C. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer digunakan metode *in-depth interview* metode ini digunakan untuk menggali secara mendalam segala informasi yang diperlukan dan tidak mungkin dilakukan dengan kuesioner.

D. Metoda Analaisis Data:

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, adapun metode berfikir yang digunakan adalah metode berpikir Induktif yaitu mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat, dan menelaah fungsi-fungsi yang telah ada dan pada akhirnya dibuat konsep sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat terealisasi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kekayaan Intelektual Tradisional sebagai asset.

Kekayaan intelektual tradisional (traditional knowledge) merupakan suatu istilah yang telah digunakan untuk mengidentifikasi suatu kekayaan masyarakat tradisional yang membedakan dengan kekayaan intelektual pada masyarakat modern. Pengetahuan tradisional memang tidak dikenal dalam sebagai definisi dalam peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dalam ketentuan Hak Cipta terdapat suatu istilah yang disebut dengan folklore. Menag sering dibedakan antara folklore (kesenian atau kebudayaan rakyat), dengan traditional knowledge, namun dalam perkembangannya dianggap sama, yaitu suatu karya cipta seni, tradisi masyarakat traditional.

Sebagai ukuran untuk menyatakan suatu karya termasuk dalam kategori traditional knowledge, maka dalam penelitian ini digunakan ukuran yang diberikan oleh WIPO yang menyatakan:

“Tradition based literary, artistic or scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.”

Lebih jauh, WIPO juga memberikan terminologi yang lebih luas terhadap *Traditional knowledge*, yaitu:

"The categories of Traditional Knowledge include agricultural knowledge, scientific knowledge, technical knowledge, ecological knowledge, medicinal knowledge, including related medicines and remedies, biodiversity-related knowledge, expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories, and artwork; element of language, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties."

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh WIPO maka dapat dikemukakan bahwa traditional knowledge meliputi begitu luas cakupannya. Traditional Knowledge meliputi bidang: pengetahuan tentang pertanian, ilmu pengetahuan, teknik, ekologi, teknik pengobatan termasuk obat-obatan, pengetahuan tentang keanekaragaman tanaman, folklor, musik, tari, nyanyian, kerajinan tangan, karya seni, unsure bahasa, nama, tanda dan indikasi geografis, dan kekayaan budaya yang dapat dipindahkan.

Penekanan terhadap kata "tradition-based" adalah dimaksudkan untuk merujuk kepada sebuah:

"... knowledge systems, creations, innovations, and cultural expressions which have generally been transmitted from generation to generation, are generally regarded as pertaining to a particular people or its

territory, have generally been developed in a non-systematic way, and are constantly evolving in response to a changing environment.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata 'tradisional' berarti: sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun.

Terminologi folklore sendiri sebenarnya pernah dipisahkan dari pembicaraan mengenai traditional knowledge oleh WIPO dan UNESCO, sebagai berikut:

"...expression of folklore means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintain by a community of (a country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community, in particular : verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles; musical expressions, such as folk songs and instrumental music; expresssions by action, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to material form; and tangible expressions, such as: productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes; musical intruments; architectural forms;

Namun dalam tulisan ini kami cenderung melihat pembicaraan mengenai traditional knowledge perlu ditempatkan ke terminologi yang lebih luas, yaitu sebagaimana yang dilontarkan oleh WIPO sebagai berikut:

The categories of TRADITIONAL KNOWLEDGE include agricultural knowledge, scientific knowledge , technical knowledge, ecological knowledge, medicinal knowledge, including related medicines and remedies, biodiversity-related knowledge, expressions of folklore in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories, and artwork; element of language, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan hal yang bersifat umum bahwa pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang: (Subagio; 2005)

- a. diciptakan, dipelihara dan disampaikan dalam konteks tradisional;
- b. secara khas berhubungan dengan kebudayaan asli tradisional atau komunitas yang melestarikan dan menyampaikannya antar generasi;
- c. terkait dengan komunitas asli melalui semacam kewajiban untuk menjaga dan melestarikan dan melindungi dari kemungkinan hal yang mengancam kelestariannya baik secara formal maupun non formal;
- d. dihasilkan dari aktivitas intelektual dalam berbagai bidang sosial, budaya, lingkungan dan teknologi;
- e. dianggap oleh komunitasnya sebagai pengetahuan tradisional.

B. Karya Intelektual yang termasuk dalam Traditional Knowledge.

Perkembangan masyarakat suatu bangsa seperti halnya bangsa Indonesia dapat dipastikan memiliki berbagai macam traditional knowledge, terlebih lagi bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta diakui sebagai daerah yang memiliki berbagai peninggalan sejarah yaitu dengan keberadaan Kraton sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan dan perdagangan pada masa lalu.

Menang harus diakui bahwa kekayaan budaya seni dan tradisi yang sekarang ini dimiliki oleh DIY tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang murni dan muncul tanpa dipengaruhi oleh tradisi serta seni dari masyarakat lain. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa interaksi kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain senantiasa menghasilkan suatu kebaruan dalam tradisi dan karya seni serta budaya.

Dari berbagai sumber dapat diketahui bahwa DIY memiliki berbagai macam seni dan tradisi serta budaya yang dipandang sebagai sesuatu yang khas jika dibandingkan dengan seni, tradisi dan budaya masyarakat diluar DIY. Namun demikian bahwa interaksi antar masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta beralan dengan baik dan batas antara kabupaten satu dengan kabupaten lain di DIY tidak dibatasi oleh batas yang tidak dapat ditembus oleh masyarakat maka seni dan tradisi satu daerah dengan daerah yang lain menunjukkan kemiripan dan bahkan kesamaan.

Seni Tradisi dan budaya tersebut antara lain:

	KAB / KOTA	NAMA PRODUK
	Bantul	Batik halus tulis
		Kerajinan kulit/ Wayang
		Kerajinan Topeng
		Marning
		Patung Primitif
		Krupuk
	Sleman	Tenun
		Anyaman bambu
	Gunung Kidul	Patilo
		Jamu Gendong
		Kerajinan Kayu
	Kulon Progo	Emping Mlinjo
		Slondok
		Krimpying
		Gula kelapa
		Tas
		Enting – enting jahe
	Yogyakarta.	Kerajinan Tas
		Kerajinan Dompot
		Batik

Teknologi tradisional meliputi:

Jenis	Komoditi
Kerajinan	Anyaman Agel
	Anyaman Pandan
	Rami
	Kulit
	Wayang Golek
Pakaian	Batik
	Bordir
	Konveksi
	Lenun AlBM
Makanan	Tahu
	Krimpying
	Emping Mlinjo
	Tempe
	Jenang Alot
	Gula Kelapa
Bahan Bangunan	Pengolahan Ketela
	Gamping
	Genteng
Perkakas RT	Mebel Kayu
	Pande Besi
	Kaleng
	Mebel Logam
	Sabut Kelapa
	Anyaman Bambu
	Gerabah

Kesenian dan Tradisi

Kabupaten/ Kota	Jenis Kesenian Tradisional/Tradisi
Kotamadya Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wayang kulit 2. Wayang golek, 3. Wayang klitik, 4. Wayang wong, 5. Kesenian tari, tari klasik, tari modern, 6. Seni Tayub, 7. Ketoprak, 8. Serandul, 9. Upacara siraman pusaka kraton, 10. Labuhan 11. Upacara Sekaten, 12. Kuda lumping
Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jathilan, 2. Gejok Lesung, 3. Kethoprak, 4. Upacara Rebo Wekasan, 5. Upacara Kupatan Jolosutro, 6. Upacara labuhan 7. UpacaraNawu Kong 8. Kerajinan Batik 9. Kerajinan Gerabah 10. Kerajinan Sungging 11. Kerajinan Topeng 12. Kerajinan Patung 13. Kerajinan Perak
Kabupaten Kulonprogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jathilan 2. Reog 3. Kobro 4. Angguk 5. Wayang Kulit 6. Wayang Wong 7. Kethoprak 8. Upacara adat Labuhan (keluarga Pakualaman) 9. Kerajinan Sulam 10. Kerajinan Anyam-anyaman
Kabupaten Gunungkidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jathilan, 2. Gejog Lesung, 3. Reyok, 4. Kethoprak, 5. Upacara Rebo Wekasan, 6. Upacara Kupaten Jolosutro, 7. Upacara Labuhan, 8. Upacara Bersih Telaga 9. Upacara Ruat Bumi
Kabupaten Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenian Angguk, 2. Jathilan, 3. Badui, 4. Wayang Kulit

* diolah dari berbagai sumber

Data-data diatas menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh masyarakat DIY. Pengetahuan tradisional (Traditional knowledge) merupakan kekayaan suatu bangsa. Hal ini karena Traditional Knowledge merupakan suatu yang ada dalam masyarakat digunakan dan dikembangkan serta dipelihara oleh masyarakat pemiliknya. Penggunaan traditional knowledge di maknai karena traditional knowledge merupakan sesuatu milik yang sifatnya pengetahuan dan bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungan hidup mereka. Demikian pula dipelihara oleh masyarakat karena traditional knowledge memang terbukti memberi manfaat bagi masyarakat dalam mempertahankan hidup mereka. Oleh karena itu masyarakat pemilik traditional knowledge berupaya untuk memperkembangkan traditional knowledge yang dimiliki sehingga kondusif terhadap tantangan kemajuan masyarakatnya sendiri.

Dengan pertimbangan di atas maka dapat dikemukakan bahwa pengetahuan dan kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh DIY pada dasarnya merupakan sesuatu kekayaan yang memang masih dipelihara dan digunakan karena memiliki nilai dan manfaat bagi kehidupan mereka.

Kekayaan intelektual tradisional dapat dibedakan menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah kekayaan intelektual tradisional yang berkaitan atau bersumber pada faktor kultural atau kepercayaan masyarakat akan suatu relasi antara manusia dengan alam atau manusia dengan peristiwa masa lampau. Kekayaan intelektual tersebut berupa tradisi-tradisi yang dimiliki

masyarakat atau kelompok masyarakat di suatu desa atau komunitas. Tradisi atau upacara tersebut misalnya:

1. Upacara siraman pusaka kraton,
2. Labuhan
3. Upacara Sekaten,
4. Upacara Rebo Wekasan,
5. Upacara Kupatan Jolosutro,
6. Upacara labuhan
7. Upacara Nawu Kong
8. Upacara Bersih Telaga
9. Upacara Ruat Bumi

Kekayaan intelektual tradisional tersebut pada awalnya memang jauh dari pertimbangan dan penilaian yang sifatnya material ekonomis. Upacara adat dan tradisi dilakukan oleh masyarakat dalam rangka tetap menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan alam. Dengan demikian pelaksanaan atau pergelaran upacara-upacara tradisional seperti ini tidak diselenggarakan untuk memperoleh kemanfaatan ekonomi atau keuntungan bagi masyarakat tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya dan dengan majunya dunia pariwisata, maka upacara tradisional yang pada awalnya tidak atau jauh dari motif ekonomi pada saat ini masuk unsure ekonomi di dalamnya. Penyelenggaraan upacara atau tradisi sekarang dilakukan dan dikemas dengan digabungkan dengan kehendak untuk mendatangkan para wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan manca negara. Sebagai contoh yang masih berlangsung hingga pada

tahun 2005 adalah kegiatan upacara sekaten. Upacara sekaten sendiri pada dasarnya merupakan suatu rangkaian upacara kraton Yogyakarta yang sarat dengan simbol hubungan antara raja dan kawula serta antara Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Umat manusia. Sekaten kini digelar dengan dibarengkan dengan pasarmalam yang sangat kental dengan kegiatan bisnis dan pencarian keuntungan dan pada akhirnya dapat menghilangkan esensi sekaten itu sendiri. Kesadaran akan bahaya yang mungkin muncul tersebut maka untuk perayaan sekaten tahun 2006 dan seterusnya akan diusahakan dikembalikan pada tradisi lama yang lebih mendekati pada makna awalnya.

Kegiatan semacam ini jika dicermati lebih dalam, maka perlu langkah yang hati-hati. Tidak boleh kemudian demi komoditas ekonomi terkhusus aspek pariwisata kemudian masyarakat menjadi tidak lagi menghayati tradisi sebagai milik yang patut dipertahankan karena makna spiritualnya. Jangan sampai justru masyarakat memandang sebagai event yang profane dan hanya sebagai sesuatu komoditas yang dapat dijual dan mendatangkan uang.

Berbeda halnya dengan karya intelektual tradisional yang berupa kebendaan. Karya intelektual yang berupa karya kebendaan memang disamping sebagai ungkapan nilai yang dihayati oleh masyarakat, karya-karya tersebut memang sejak semula diarahkan guna pemenuhan kebutuhan kehidupan mereka. Karya-karya seni tersebut merupakan hasil kerajinan tangan masyarakat. Pada awalnya karya batik misalnya memang diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan sandang, namun demikian dengan spesialisasi dan pertukaran yang terjadi dalam masyarakat maka nilai

ekonomis dapat diperoleh dari kegiatan membatik tersebut, demikian pula dengan karya kerajinan tangan lainnya.

C. Konsekuensi Pariwisata terhadap Kekayaan Tradisional masyarakat DIY

Diakui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota pariwisata yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kunjungan wisatawan domestic maupun manca Negara merupakan sesuatu yang selalu diupayakan. Yogyakarta sebagai kota pariwisata memiliki tawaran obyek yang erat terkait dengan Kraton. Dengan demikian obyek yang dapat ditawarkan adalah obyek yang erat pula dengan tradisi dan karya-karya yang terkait dengan tradisisi atau bernuansa tradisional.

Wisatawan manca Negara yang berkunjung ke DIY dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok kepentingan antara lain:

1. Kelompok pertama adalah wisatawan manca Negara yang hanya datang untuk melihat berbagai keindahan atau untuk kunjungan bisnis. Biasanya mereka tinggal dihotel berbintang dan kunjungan berlangsung tidak terlalu lama.
2. Kelompok yang bertujuan untuk melihat dan mempelajari tradisi serta hal-hal yang unik dan memiliki nilai lebih. Mereka biasanya tinggal dikampung wisatawan seperti halnya di daerah Sosro Wijayan atau Tirtodipuran. Mereka biasanya menghabiskan waktu kunjungan relatif lama. Kunjungan mereka tidak di tempat rekreasi tetapi ke sentra kerajinan

atau mengundang kelompok atau pekerja seni untuk mendemonstrasikan cara pembuatan sesuatu produk kerajinan tertentu. Dapat juga wisatawan setiap hari mengunjungi tempat sentra kerajinan tertentu dalam jangka waktu sampai selama satu bulan.

Kekhawatiran diambilnya kekayaan tradisional masyarakat DIY dengan adanya kelompok wisatawan mancanegara kategori ke dua memang cukup beralasan meskipun menurut nara sumber bahwa tidak semua karya intelektual masyarakat DIY memiliki nilai jual tinggi dan juga tidak semua karya intelektual tradisional yang ada di DIY dapat dengan mudah diambil oleh pihak lain apa lagi oleh bangsa lain. Memang tidak semua karya intelektual tradisional tidak semuanya dapat dengan mudah diambil oleh bangsa lain, namun demikian diakui pula bahwa masyarakat Yogyakarta juga tidak mengerti apa sebenarnya yang dicari oleh wisatawan manca Negara yang berkunjung di Yogyakarta dalam waktu lama dan mempelajari banyak hal tentang seni dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat DIY.

Dari uraian di atas maka langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan inventarisasi atas kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh masyarakat DIY. Dengan demikian maka jikalau dikemudian hari ada pendakuan karya oleh bangsa asing dapat diajukan keberatan dengan bukti tertulis dan memiliki akurasi sebagai bukti.

D. Subyek Kekayaan Intelektual Tradisional

Dalam kerangka perlindungan hukum, kekayaan intelektual tradisional maka perlu ditetapkan siapakah yang dapat diakui sebagai subyek yang berhak atas kekayaan intelektual tradisional, sehingga dengan demikian dapat ditentukan subyek yang dapat menuntut mana kalau terdapat perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat atas eksploitasi kekayaan intelektual tradisional tersebut oleh bukan masyarakat yang berhak.

Kekayaan intelektual tradisional muncul dan tumbuh berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat yang memilikinya. Kekayaan intelektual tradisional digunakan oleh kelompok masyarakat dan tidak seorangpun dapat menyatakan sebagai pemilik. Dari wawancara dengan warga masyarakat diperoleh informasi bahwa kekayaan intelektual tradisional merupakan warisan dari nenek moyang mereka yang pada dasarnya mereka bersaudara. Oleh karena itu mereka tidak mau nyatakan bahwa kekayaan intelektual tersebut merupakan karya pribadi orang tertentu.

Pengakuan ini sejalan dengan konsep komunalitas yang ada dalam masyarakat DIY yang dalam beberapa hal masih dipertahankan dan dipelihara. Oleh karena itu menjadi tidak mudah untuk menentukan siapa pemilik kekayaan intelektual tradisional tersebut.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan kekayaan intelektual tradisional dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan subyek yang menderita kerugian secara materiil jika kekayaan

intelektual tradisional tersebut dieksploitasi oleh bangsa lain. DIY sebagai kota tujuan wisata yang mengandalkan kerajinan dan karya-karya tradisional hampir pasti tidak akan dikunjungi oleh wisatawan manakala kekhasan produk tidak ada lagi. Dari ilustrasi kecil ini sudah dapat diberikan pemahaman bahwa kekayaan intelektual tradisional merupakan asset yang menjadi milik dari masyarakat DIY dan pasti para pengrajin akan kehilangan potensi keuntungan jika asset tersebut hilang.

Fakta ilustratif tersebut menunjukkan bahwa kerugian tidak hanya diderita oleh satu atau dua orang saja, tetapi kerugian akan dialami oleh banyak orang yang menggeluti kegiatan kerajinan tersebut. Dengan demikian maka kekayaan intelektual tradisional tersebut memang di"miliki" oleh kelompok masyarakat bukan oleh satu pribadi manusia.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa ketentuan perlindungan kekayaan intelektual yang dikenal dalam sistem hukum kekayaan intelektual adalah bersifat individual dan tidak mengakomodasi kelompok masyarakat sebagai subyek pemilik.

Hal tersebut dapat dicermati dari ketentuan Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 2 (1) yang menyatakan bahwa hak cipta adalah:

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku."

Ketentuan tersebut secara tegas dan jelas menyatakan bahwa subyek hak adalah pencipta. Sedangkan dalam pengetahuan intelektual tradisional pencipta adalah tidak dapat ditentukan secara pasti atau bahkan tidak dikenal lagi siapa yang menciptakan suatu karya tersebut. Terhadap karya cipta yang tidak diketahui lagi siapa penciptanya ketentuan pasal 10 UU no. 19 tahun 2002 menyatakan Pasal 10 undang-undang No. 19 tahun 2002 menyatakan bahwa :

1. "Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya".
3. untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. ...

Mengingat bahwa hak cipta berisikan hak ekonomi disamping hak moral, maka negara dalam pasal tersebut memiliki makna bahwa negara memegang hak ekonomi mewakili kepentingan warga negara. Dengan kata lain bahwa pengambilan hak ekonomi oleh bukan bangsa Indonesia adalah sebagai perbuatan yang melanggar hak tersebut.

Negara sebagai pepegangan hak cipta atas karya intelektual tradisional tentu memiliki berbagai maksud. Negara sebagai pepegang hak cipta dalam rangka menjaga karya intelektual tradisional dari kepunahan dan juga

mewakili warga negara dalam berhadapan dengan bangsa lain dalam mempertahankan hak eksploitasi atas karya intelektual tradisional tersebut.

Terdapat persoalan hukum yang muncul dari ketentuan pasal 10 ayat (3) mengenai “instansi yang terkait”. Ketentuan umum Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta angka 16 menyatakan: Menteri adalah menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta. Sedangkan angka 17 menyatakan: Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen yang dipimpin oleh Menteri. Penjelasan undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

Kekayaan intelektual tradisional dapat berdimensi karya teknologi tradisional dan karya seni tradisional. Dengan pemahaman tersebut maka jika didekati melalui susunan departemen, tugas dan fungsi pokoknya, maka instansi yang terkait dengan kekayaan intelektual tradisional dapat meliputi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Pendidikan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan dan Pemerintah Daerah. Masing-masing instansi ini dapat mengambil peran dalam rangka melindungi dan melestarikan kekayaan intelektual tradisional.

Dari penelitian dapat dikemukakan bahwa memang di DIY terdapat instansi vertikal dari departemen-departemen yang disebut di muka. Masing-masing Dinas/Kanwil mengambil peran sesuai dengan pemahaman

mereka, demikian juga pemerintah daerah. Aktivitas dalam rangka memelihara dan melindungi kekayaan intelektual tradisional dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap para pengrajin atau pekerja seni;
2. melakukan pembinaan dalam produksi dengan standar ekspor;
3. fasilitasi dalam upaya pencarian modal kerja;
4. melakukan promosi ekspor;
5. pameran produk kerajinan rakyat;
6. membangun fasilitas showroom untuk kerajinan rakyat;
7. memberikan penyuluhan tentang perlindungan hukum;
8. melakukan inventarisasi produk;
9. melakukan pendaftaran atas karya intelektual tradisional dan lain-lain kegiatan.

Berbagai kegiatan dalam rangka melindungi dan melestarikan kekayaan intelektual tradisional dapat diketahui bahwa masing-masing instansi yang berkaitan dengan hal tersebut dalam melakukan aktivitasnya masih sangat tergantung pada anggaran yang tersedia. Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa satu instansi dengan instansi lain sering kali memiliki program yang sama dengan sasaran program kelompok yang sama. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa fungsi koordinasi belum dilakukan secara maksimal sehingga kerugian dalam pembiayaan dan kemanfaatan bagi peserta program juga menjadi minimalis.

Hal yang sangat menarik untuk dibahas adalah upaya perlindungan kekayaan intelektual tradisional dengan melakukan pendaftaran. Meskipun hal ini baru dilakukan untuk kekayaan intelektual tradisional berupa batik, namun pengkajian terhadap kegiatan ini perlu ditelaah secara lebih mendalam. Pertama adalah bahwa karya seni batik tradisional merupakan kekayaan masyarakat yang tidak dapat dinyatakan dimiliki oleh kelompok tertentu. Hal ini mengingat bahwa di Yogyakarta seni batik tradisional bersumber dari Kraton. Pengrajin batik yang ada dan tersebar diberbagai pelosok Yogyakarta melakukan aktivitas membatik secara turun-temurun. Oleh karena itu tidak mungkin pendaftaran dilakukan oleh subyek yang tidak mewakili kepentingan masyarakat dan menjamin posisi masyarakat Yogyakarta untuk tetap dapat mengambil manfaat ekonomi. Pendaftaran yang dilakukan dengan menunjuk subyek kelompok pengrajin tertentu adalah kurang produktif dalam upaya atau kehendak untuk menjamin kepentingan masyarakat Yogyakarta secara keseluruhan.

Kekhasan batik Yogyakarta diakui dan ini dapat dibedakan secara tegas dengan batik tradisional dari Solo atau Cirebon misalnya. Oleh karena itu kekhasan yang demikian mesti dapat diakui sebagai aset daerah dan menjadi kekayaan daerah karena kekhasannya tersebut. Untuk itu pendaftaran jika akan dilakukan adalah dengan subyek pemilik Pemerintah Daerah, hal ini karena pemerintah daerah dapat menjadi representasi dari masyarakat daerah itu. Dengan demikian maka pendaftaran yang dilakukan haruslah atas nama pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah daerah sebagai representasi masyarakat warga dalam daerah tersebut dapat diterima, namun demikian jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 10 UUHC maka harus dipertimbangkan pula dalam hal karya intelektual tradisional diambil atau dieksploitasi oleh bangsa lain. Dalam hal kekayaan intelektual yang bersinggungan dengan negara lain maka hukum negara hampir dapat dipastikan tidak dapat diterapkan di negara lain. Oleh karena itu makna pendaftaran hanya sekedar sebagai upaya untuk melakukan oposisi jika karya intelektual tersebut diambil atau didaku oleh bangsa lain.

BAB VI

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi kekayaan intelektual tradisional meliputi:
 - a. aspek pemeliharaan dan pelestarian dengan melakukan pembinaan;
 - b. aspek perlindungan dengan melakukan inventarisasi dan pendaftaran melalui rejim hak kekayaan intelektual yang ada.
2. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai pemegang hak kekayaan intelektual tradisional dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah merupakan representasi seluruh warga di daerah tersebut.
3. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual tradisional antara lain:
 - a. ketidak jelasan instansi yang bertanggung jawab atas kekayaan intelektual tradisional;
 - b. kurangnya koordinasi dari instansi yang selama ini mengelola kekayaan intelektual tradisional di daerah.

B. Saran-Saran:

1. Inventarisasi dan dokumentasi atas kekayaan intelektual tradisional merupakan langkah yang sangat mendesak untuk dilakukan atas semua kekayaan intelektual tradisional yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan guna mencegah kepunahan atas kekayaan intelektual tradisional yang memiliki nilai historis, kultural dan ekonomis. Disamping itu dapat digunakan untuk mengajukan oposisi atas klaim yang dilakukan pihak asing atas kekayaan intelektual bangsa Indonesia.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya strategis bersama dengan departemen Hukum dan HAM dalam memantau penggunaan kekayaan intelektual tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh pihak asing diluar negeri.
3. Koordinasi antar instansi selalu harus dilakukan guna mencari langkah efektif dalam upaya melindungi kekayaan intelektual tradisional.

DAFTAR PUSTAKA:

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press. Jakarta.

Hawin, M; Perlindungan Pengetahuan Tradisional, FH-UGM, 2005

Henry Soelistyo Budi. Perlindungan Bagi Perajin dalam Kerangka Hak Cipta, Desain Industri dan Indikasi Geografis. FH-UGM 2005.

Ignatius Haryanto. 2004. *Enclosures of the Mind (Kapling-Kapling Daya Cipta Manusia)*. Cindelaras, Yogyakarta.

Tim Lindsey. et. al. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Alumni, Bandung.

Saidin, S.H., M.Hum, H. OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2004

Subajo. Ign: Kerangka Kebijakan Tengelolaan Pengetahuan Tradisional di Indonesia, FH. UGM 2005

www.pemdajogja.go.id

Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak Cipata